

**PERAN ORGANISASI KEAGAMAAN DALAM PEMBERDAYAAN
EKONOMI KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) PEREMPUAN
BERBASIS PROGRAM PADA MODAL SOSIAL**

Di Desa Sukadamai, Kelurahan Toboali-Kec. Toboali-Bangka Selatan

Hadarah Rajab¹

Abstract : *This writing is to show how women religion organization has an interrelationship use social capital by giving economical benefit to green vendors in local term called "Kemplang" in Bangka. Social capital which performs social informal relationship, also contribute to the proses of how the community group help others aspecially women green vendors as community group which have role in rising fund to empower their efforts.*

Keywords: *Social modal, organization, economic, women.*

PENDAHULUAN

Kehidupan sosial yang terdiri dari individu, keluarga dan masyarakat tidak terlepas dari pranata dan norma-norma yang terkandung didalamnya. Aturan-aturan dalam bentuk pranata dan norma senantiasa mengarahkan individu-individu maupun masyarakat membentuk suatu komitmen tertentu yang memunculkan perilaku kelompok secara bersama dan simultan. Perilaku tersebut berupa kegiatan bersama antar warga masyarakat seperti adanya kerjasama dan gotong royong, sambatan, dan kegiatan berkaitan dengan adat serta tradisi masyarakat lainnya. Hubungan-hubungan sosial informal yang telah terjalin tersebut merupakan modal sosial yang dapat diperankan pada persoalan-persoalan pembangunan ekonomi yang sifatnya lokal² termasuk dalam hal pengentasan kemiskinan, karena hal-hal ini akan lebih mudah untuk dicapai dan biayanya kecil jika terdapat modal sosial yang besar³.

Kelompok-kelompok yang terbentuk dan terbina dengan sendirinya terjadi karena adanya komitmen dan kesepakatan bersama dalam masyarakat yang

¹Dr.Hadarah Rajab. M.Ag, sebagai Dosen, Peneliti dan saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua. II bidang Administrasi dan Keuangan di lingkungan STAIN SAS Babel.masa kerja thn 2015-2019.

²Tonkiss, F. **"Does Social Capital and Economy,"** Dalam F. Tonkiss dan A. Pasey (eds.) *Trustand Civil Society*. New York:St. Martin's. 2000, hlm. 76

³Narayan dan Pritchett 1997, Grooaert dan Van Bastelaer 2001., hlm. 56

merupakan wadah berkumpulnya masyarakat dinamakan kelembagaan sosial⁴. Kelembagaan-kelembagaan sosial ini selanjutnya membentuk kelompok masyarakat, sebagai usaha individu-individu dalam kelompok tersebut meningkatkan taraf hidup keluarga dan masyarakat, serta bagaimana modal sosial memberi manfaat ekonomis bagi pelaku usaha mereka dalam kelompok masyarakat.. Tonkiss⁵ mengingatkan bahwa modal sosial barulah ekonomis kalau dapat membantu individu atau kelompok.

Tidak dapat dipungkiri terbentuknya kelompok keuangan mikro yang *notabene* didirikan oleh kelompok perempuan seperti kelompok arisan RT, pasar, pengajian dan lain sebagainya merupakan modal sosial yang telah dikembangkan oleh Pokmas perempuan dimana mereka berada. Dalam hal kredit misalnya, Bastelaers telah mengingatkan bahwa anggota masyarakat yang paling miskin seringkali masih tidak memiliki akses terhadap fasilitas mikro-kredit, sekalipun program-program kredit formal maupun informal yang ditujukan untuk kaum miskin sudah menempatkan jaringan-jaringan sosial sebagai elemen penting.⁶

Pokmas Perempuan dengan keterbatasan dan ketidakberdayaan mereka berpotensi untuk berkembang manakala pengetahuan dan pengalaman kaum perempuan dihadirkan sebagai jalan untuk menghargai kemanusiaan perempuan (peduli perempuan) melalui pokmas masing-masing. Sebaliknya kelemahan tersebut juga berpotensi kaum perempuan menyerah terhadap kondisi kehidupan dan semakin jauh dari harapan sebagai suatu Pokmas perempuan yang mandiri. Di sisi lain, Pokmas perempuan menjadi penting dalam menopang pendapatan keluarga dan kesejahteraan masyarakat dengan memberi jalan mengakses modal dalam peningkatan usaha mereka agar lebih mandiri dan memiliki keberdayaan dalam meningkatkan usahanya.

Tulisan ini mencoba menunjukkan yang selanjutnya menjadi Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Program, bagaimana modal social yang merupakan jaringan social dalam kelompok masyarakat memberikan manfaat

⁴Esmen, Milton J. dan Norman T. Uphoff, **Local Organisations: Intermediaries in Rural Development**, 1988. Cornell University Press, Ithaca and London. 321

⁴*Ibid.*,

⁵Tonkiss., *Op.cit.*

⁶Bastelaers ., *ibid.*⁶

ekonomis pada kelompok penjual Kemplang di Dusun Sukadamai, Kelurahan Toboali Kec. Toboali-Bangka Selatan. Penjual Kemplang adalah istilah local Bangka sebagai sebutan pada pedagang yang menjajakan dagangannya berupa sayur-mayur dari rumah ke rumah atau dari kampung satu ke kampung lainnya, termasuk di tokoh penjual makanan khas daerah Bangka.

A. Kondisi Perempuan Indonesia

Indeks pembangunan manusia skala internasional dan nasional dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Kondisi dan posisi perempuan pada tiga aspek tersebut di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pendidikan

Di bidang pendidikan, kaum perempuan masih tertinggal dibandingkan laki-laki. Kondisi ini antara lain disebabkan adanya pandangan dalam masyarakat yang mengutamakan dan mendahulukan laki-laki untuk mendapatkan pendidikan daripada perempuan. Berdasarkan global Monitoring Report (2006), terdapat 771 juta orang buta aksara di seluruh dunia. Sebanyak 72,7 persennya adalah perempuan.

2. Kesehatan

Di bidang kesehatan dan status gizi perempuan masih merupakan masalah utama, yang ditunjukkan dengan masih tingginya angka kematian ibu (AKI) walau tahun 2004 angka kematian bayi sekitar 30,8 persen per 1000 kelahiran hidup dan angka kematian ibu sekitar 270 dari per 100 ribu kelahiran, terdapat penurunan tahun 2007 angka kematian bayi mencapai 26,9 persen per 1000 kelahiran hidup dan angka kematian ibu berkisar 248 per 100 ribu kelahiran. (Sumber BPS, 2008)⁷.

3. Ekonomi

Di bidang ekonomi, secara umum partisipasi perempuan masih rendah, kemampuan perempuan memperoleh peluang kerja dan berusaha masih rendah, demikian juga dengan akses terhadap sumber daya ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) posisi Februari 2007 66,60 persen dari jumlah angkatan kerja mencapai 108,13 juta orang, bertambah 1,74 juta orang dibanding jumlah angkatan kerja Agustus 2006 sebesar 106,39 juta orang atau

⁷(Sumber BPS, 2008)⁷.

bertambah 1,85 juta orang dibanding Februari 2006 berada sedikit dibawah TPAK Februari 2006 sebesar 66,74 persen sebesar 106,28 juta orang dan bertambah 2,33 juta orang dibanding Februari 2005 sebanyak 105,80 juta orang, yang didominasi kaum laki - laki (BPS, 2008)⁸.

B. Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Kelompok Masyarakat

Kebijakan pemerintah untuk memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat di tingkat lokal akan sangat berarti apabila hal ini dimulai dengan peninjauan kebutuhan sehingga kelompok-kelompok tersebut benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat dan sinergi dengan program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat lokal. Pada dasarnya ada elemen penting dalam masyarakat lokal, yaitu pemerintah lokal, organisasi politik lokal, dan organisasi lokal⁹. Terminologi ini yang menyatakan bahwa dalam masyarakat terdapat elemen: *state, political society, civil society, economic society dan rule of law*¹⁰.

Pemberdayaan adalah sebuah proses yang membuat orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Yang paling penting di sini adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Bahkan sebaliknya banyak kelompok masyarakat yang menjadi tergantung dan semakin tidak berdaya. Oleh sebab itu tidak mengherankan apabila dalam program-program kebijakan sosial ini cenderung menggunakan *charity strategy*, pendekatan *patronizing*, asuh (*nurture*) dan proteksi.¹¹

Sesuai dengan permasalahan masyarakat kebijakan yang paling tepat mestinya yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran dengan memberikan modal usaha dengan berbagai pertimbangan dan

⁸(BPS, 2008)⁸.

⁹Esman, Milton J. dan Norman T. Uphoff, *Op.cit.*,

¹⁰Linz, Juan J dan Alfred Stepan, 1996. **Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe**, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London., hlm.89

¹¹Tjokrowinoto, Moeljarto. **Pembangunan, Dilema dan Tantangan**. Pustaka Pelajar Yogyakarta. 1996. Hlm. 217

¹⁵Rahardjo, Murwatie B. dan Sukardi Rinakit, **Pemberdayaan Petani dalam Buku Pemberdayaannya, Konsep, Kebijakan dan Implementasinya**. Center For Strategic and International Studies. Jakarta.1996. Hlm. 231

disesuaikan dengan sumber daya yang ada. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila pendekatan yang digunakan dalam kebijakan ini disebut dengan: hitung, biayai dan salurkan (*count, cost and deliver*).¹² Sehingga hal ini sesuai dengan salah satu ciri lain kemiskinan pedesaan yang sudah lama dikenali para ahli sejak J.H. Boeke adalah keharusan masyarakat desa terhadap kredit/pinjaman. Pinjaman ini diperlukan biasanya karena penghasilan keluarga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

KELOMPOK, ORGANISASI SEBAGAI INSTITUSI MASYARAKAT

Dalam usaha meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup masyarakat perlu digali cara-cara pengelolaan usaha yang paling sesuai. Misalnya, melalui apa yang disebut "*conscience collective*" akan dapat menahan kekuatan arus individualism yang menyertai modernisasi, dan semangat kegotong-royong dapat diberi fungsi-fungsi baru sehingga dapat meningkatkan taraf hidup anggota kelompok. Peran penting modal sosial dalam kemajuan-kemajuan masyarakat dapat diketahui dari esensi modal sosial yang menunjukkan "*Trust*" dan norma-norma kooperasi sipil yang esensial agar masyarakat berfungsi dengan baik dan juga penting bagi kemajuan ekonomi dari masyarakat yang bersangkutan¹³. Tanpa ada modal sosial yang baik, maka tindakan-tindakan yang muncul cenderung non-kooperatif dan hasilnya akan *inferior*. Sebaliknya modal sosial yang tinggi secara potensial membawa masyarakat pada *outcomes* yang lebih baik dengan adanya fasilitasi kerjasama yang lebih besar¹⁴. Dengan demikian modal sosial berperan mengembangkan kualitas manusia yang memang menjadi tujuan pembangunan dan kualitas tersebut yang dimengerti sebagai manusia yang mandiri dan bermanfaat, manusia yang produktif, efisien, dan bermoral.

Pokmas Perempuan dalam satu sisi, di masyarakat Indonesia wajar ada sebagai wadah kaum perempuan untuk menunjukkan perannya di lingkungan mereka. Sebagaimana Brown dan Moberg¹⁵ mengungkapkan bahwa organisasi berada dalam kontinum individu-masyarakat. Mereka berdua menyebutkan bahwa masyarakat itu merupakan gabungan dari komunitas. Komunitas merupakan gabungan dari

¹⁶Sjahrir, *Op.cit.* hlm. 49

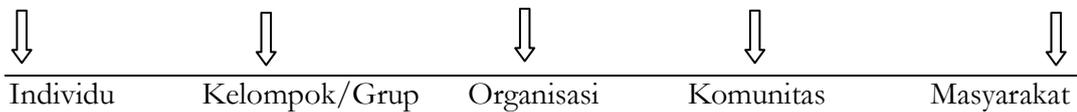
¹⁷ De Mello dalam Brata, *Op.Cit.*

¹⁸ Narayan dan Pritchett dalam Barata. *Op.Cit.*

²⁰Ruwiyanto, *Op.Cit*

kelompok, dan kelompok merupakan gabungan dari individu. Gambar 1 menunjukkan kontinum tersebut.

Bagan Kontinum Individu – Masyarakat



Sebagai suatu sistem, organisasi terdiri dari setidaknya-tidaknya empat sub-sistem, yaitu Taksonomi organisasi, struktur organisasi. Proses organisasi dan individu-individu dalam organisasi serta kepemimpinan yang dikembangkan. Apabila organisasi tertentu telah mempunyai sifat sebagai organisasi formal, maka sub sistem atau kelima sub sistem tersebut saling mempengaruhi dalam gerakannya untuk mencapai tujuannya. Adapun kelompok sebagai sub sistem yang lebih kecil dari organisasi, iapun juga sebagai suatu system tertentu. Kelompok juga terdiri dari individu-individu yang didalamnya kait-mengait dengan struktur kelompok itu, system taksonomi kelompok dan proses yang terjadi dalam kelompok, serta kepemimpinan yang dikembangkan didalamnya.

A. Membangun Institusi Kelompok Masyarakat (Pokmas) Perempuan Dalam Pengembangan Sektor Ekonomi

Perlakuan masyarakat terhadap perempuan sangat bervariasi terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: karena pengetahuan masyarakat lokal atau kearifan lokal masyarakat (*sosial lokal wisdom*), budaya dan adat istiadat lokal. Nampak beberapa contoh pada masyarakat Bugis utamanya yang tersebar di daerah tengah dan utara Provinsi Sulawesi Selatan bagi kaum laki-laki sangat lazim pergi berbelanja di Pasar sebaliknya di Pulau Jawa kurang lazim manakala sebagian besar kaum laki-laki berbelanja sayuran di pasar tradisional, bagi kaum perempuan Bugis pada umumnya sangat lazim untuk melakukan kegiatan perdagangan sedangkan kaum laki-laki menggarap sawah atau kebun bahkan menanam padi sebaliknya di Pulau Jawa yang paling lazim adalah para kaum lelaki petani mengolah sawah dan kaum perempuan menanam padi.

Di wilayah perkotaan di Jawa banyak kaum perempuan bekerja sebagai buruh “*linting*” rokok terutama di kabupaten Kediri, Bangka, Kudus dan kawasan Industri rokok lainnya. Maka kerumunan-kerumunan masyarakat yang memiliki kegiatan sejenis ini biasanya akan membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki *interest* atau kepentingan tertentu.

Kelompok-kelompok perempuan yang terbentuk dengan sendirinya tanpa ada rekayasa atau intervensi dari pihak luar dan murni untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri disebut sebagai Institusi atau kelembagaan masyarakat yang didasarkan pada komitmen bersama berupa kesepakatan yang terikat dengan norma atau nilai sosial yang dipahami masyarakat bersangkutan. Namun demikian adapula kelompok masyarakat lainnya yang terbentuk berdasarkan adanya kepentingan program-program pembangunan. Usaha pengelompokan tersebut juga dimaksudkan untuk memudahkan memilih kelompok yang mana dapat dipergunakan sebagai media apa bagi program-program pembangunan masyarakat, kelompok ini biasa disebut institute atau lembaga/organisasi¹⁶.

Di sisi lain, persoalan memperoleh penghasilan merupakan persoalan yang banyak dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Seperti diungkapkan, dalam hidup keseharian, modal sosial atau hubungan antar individual merupakan salah satu sumber daya atau modal yang digunakan orang dalam strategi pemecahan persoalan kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, sektor informal menjadi sangat penting untuk mengembangkan usaha sampingan akibat dari krisis yang banyak melanda sektor-sektor modern membawa akibat pada berkurangnya tenaga kerja yang diserap atau dengan kata lain terjadi peningkatan pengangguran serta telah membalikkan tren formalisasi ekonomi¹⁷. Yang mendasar pada kelompok kepentingan ekonomi, ada tiga tahap kemajuan kelompok. Tahap pertama dapat disebut sebagai kelompok swakarsa, kemudian kelompok swakarya dan terakhir adalah kelompok mandiri. Dalam prinsip partisipasi menurut terdapat unsure penting yaitu: kesadaran, kemampuan dan kesempatan.¹⁸

¹⁶Koentjoroningrat, Mudrajad. **Otonomi dan Pembangunan Daerah.***Reformasi. Perencanaan, Strategi, dan Peluang.* Erlangga, Jakarta. 2004, hlm. 75

¹⁷Suryahadi, dkk. “ **Minimum Wage Policy and Its Impact on Employment in the Urban Formal Sector**”, *Bulletin of Indonesian Economic Studies Vol39* No 1,29 – 50. 2003., 98

¹⁸Rahardjo, *Ibid.*

Berkaitan dengan kehidupan beragama, mayoritas di Indonesia masyarakatnya beragama Islam. Dalam dinamika kehidupan masyarakat islam banyak tumbuh dan berkembang Pokmas keagamaan seperti Kelompok Tahlil, Yasin dan Istighosah, Ketakmiran Masjid, majelis Pengajian dan lain sebagainya. Salah satu Pokmas keagamaan tersebut berupaya untuk melakukan pemberdayaan Pokmas Penjual sayur Keliling atau dalam bahasa jawa sebut “Penjual Kemplang”.

B. Peran Organisasi Keagamaan Memberdayakan Pokmas Perempuan: 1.

1. Penjual Keplang

Pokmas perempuan utamanya yang termasuk dalam usaha kecil dan mikro yang telah mencapai lebih dari 40 juta unit usaha apabila memperoleh dukungan yang bersifat nyata, maka kemampuan mereka dalam menyerap tenaga kerja tentu tidak diragukan lagi. Dengan ratio, apabila 10 % dari setiap angkatan kerja mau dan mampu menjadi wirausaha dan apabila usaha itu berkembang, misalnya mampu menyerap 2 orang saja maka masalah pengangguran cepat teratasi.¹⁹Jaringan social yang ada barulah bermanfaat dalam memperoleh bantuan atau pinjaman yang bersifat informal. Untuk menindaklanjuti upaya tersebut, maka upaya pemberdayaan Pokmas perempuan “Kemplang” merupakan salah satu alternative yang dilakukan kelompok pengajian perempuan dalam memberi kontribusi dalam mendukung pengembangan usaha kecil dan mikro. Koentjoroningrat²⁰juga menyebutkan bahwa usaha kecil dan usaha rumah tangga di Indonesia telah memainkan peranan penting dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha dan mendukung pendapatan rumah tangga.

2. Pengertian

Kemplang adalah istilah lokal daerah Bangka dan sekitarnya serta Bangka Belitung pada umumnya bagi penjual sayur mayur segar baik dengan mendorong gerobak, bersepeda dan bersepeda motor, dan bahkan dengan menggunakan mobil terbuka yang berkeliling mendatangi konsumen terutama ibu-ibu rumah tangga di kampung-kampung, kompleks perumahan maupun gang-gang pemukiman penduduk.

²⁷Koentjoroningrat.,*op.cit*

Kemplang tersebut terdiri dari Kemplang yang “mandiri”, “semi mandiri” dan “non-mandiri”. Kemplang mandiri jika mereka memiliki kendaraan, dagangan sendiri dan juga menerima sayuran, minuman dan makanan titipan. Kemplang semi mandiri adalah jika mereka memiliki kendaraan tetapi hanya menjual dagangan orang lain. Kemplang non mandiri apabila mereka menggunakan kendaraan dan menjual dagangan orang lain yang mempekerjakannya.

Alasan mereka ikut dalam kelompok penerima bantuan kredit informal dari Pokmas perempuan keagamaan tersebut adalah untuk menambah penghasilan keluarga. Upaya menambah penghasilan ini menjadi penting karena secara actual krisis ekonomi telah mengikis daya beli mereka. Jaringan kekerabatan ataupun teman telah memberikan manfaat bagi mereka untuk memperoleh peluang usaha.

Pengembangan pengguliran dana tidak hanya didominasi oleh kelompok yang pernah memperoleh dana saja, namun dapat diberikan kepada anggota baru yang ingin mengembangkan usahanya.

3. Majelis Pengajian (Majelis Ta’lim): Gambaran Organisasi Keagamaan Berbasis Perempuan

Majelis Ta’lim merupakan sebuah forum silaturahmi kaum perempuan muslim, di Kelurahan Toboali- Kota Bangka. Pokmas ini didirikan dengan maksud sebagai wahana silaturahmi antar ibu-ibu warga muslim. Visi yang dikembangkan adalah” Membangun persaudaraan, menjernihkan hati dan pengembangan pikir”. Sedangkan misi yang dikembangkan adalah: “Peningkatan ketahanan dan kesadaran ukhuwah, Aktualisasi Diri dan Keimanan secara terus menerus serta pengembangan ilmu pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat.

C. Strategi Apa yang Dilakukan

1). Rencana

Strategi pemberdayaan mempunyai dua arah: *Pertama*, tetap memberi peluang pada sektor tradisional dan masyarakat modern dapat tetap maju dan, *Kedua*, keberpihakan kepada masyarakat yang kurang berdaya mendapatkan perhatian utama.²¹

Untuk mencapai visi dan misi Majelis Ta’lim dikembangkan strategi antara

²¹*Ibid*,

lain: Mengaktualisasi Iman dan Ketaqwaan melalui Majelis Pengajian, Mengembangkan program jaringan kemitraan antar anggota, simpatisan dan masyarakat muslim dan Mengembangkan pusat keilmuan dan kajian serta pemberdayaan masyarakat.

2). Capaian di lapangan (Data Empirik)

Kelompok Majelis Ta'lim al-Muhajirin yang turut serta dalam Program pendampingan pemberdayaan Masyarakat khusus para Ibu pembuat Kemplang, mereka memiliki semangat dan kemandirian yang luar biasa, secara individu mereka memiliki produksi sendiri-sendiri dapat membantu suami dalam hal mendapatkan penambahan penghasilan untuk biaya hidup.

Para ibu-ibu secara umum senang dan bisa memproduksi kemplang, namun belum tersentuh oleh perhatian pemerintah secara kelembagaan sehingga kelompok Majelis Ta'lim al-Muhajirin belum bisa terkoordinir dengan para dan melembaga. Harapannya adalah kepedulian pemerintah setempat dapat mengupayakan agar pemerintah daerah dapat memberi perhatian secara khusus untuk pemberdayaan usaha para ibu-ibu agar bisa bersaing dengan dunia usaha akecil menengah seperti yang terjadi di daerah lain.

MANFAAT BAGI PEREMPUAN PEMBUAT-PENJUAL KEMPLANG

I. Rencana Aksi

Organisasi keagamaan mempunyai korelasi yang erat dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dimana institusi sebagai suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting, atau secara formal sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia.²²

Majelis Pengajian (Majelis Ta'lim al-Muhajirin) dengan frekuensi kegiatan 4 (empat) kali sebulan, selain sebagai media dakwah, juga dimaksudkan sebagai wadah silaturahmi yang memfasilitasi pengumpulan dana melalui donator tetap anggota Majelis yang bersifat sukarela dikelola oleh Lembaga Amal, Zakat, Infaq dan Shodaqoh (Lazis) bentukan Pokmas MPAP dengan langkah-langkah sebagai berikut:

²²Horton dan Hunt dalam Setianto, *Op.Cit*

a. Pengumpulan dana dari donator tetap

Proses pengumpulan dana dilakukan setiap acara pengajian dilaksanakan, pertama-tama dengan menjelaskan maksud, tujuan dan sasaran penggunaan dana, termasuk jumlah anggota Pokmas Perempuan “Penjual Kemplang” yang diberi dana bergulir (*revolving fund*). Selanjutnya, sumbangan dalam bentuk dana yang diberikan oleh donator tetap warga pengajian dikumpulkan oleh Seksi Pengembangan Ekonomi Umat-MPAP.

b. Memberdayakan Pokmas Perempuan “Kemplang”

Penjual sayur keliling oleh perempuan atau yang disebut “Kemplang” merupakan para penjual dikalangan perempuan yang biasanya menjajakan sayur mayur di sekitar lingkungan masyarakat yang hidup di perkampungan dan masyarakat umum.

Penjual Kemplang ini sebenarnya telah lama berinteraksi dalam memasarkan dagangannya. Mereka umumnya merupakan satu rumpun keluarga atau memiliki rumah yang saling berdekatan satu sama lain. Modal sosial menunjuk pada seperangkat sumber daya yang melekat dalam hubungan keluarga dan dalam organisasi sosial komunitas.

Kelompok perempuan Pembuat Kemplang dan sekaligus menjadi penjual Kemplang perempuan merupakan kelompok masyarakat yang karena alasan tertentu termasuk kelompok masyarakat yang kurang mampu, hal ini ditandai dengan tingkat pendidikan maupun standar hidup mereka yang masih rendah, yaitu adanya kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.²³ Hal ini mendorong Pokmas Perempuan Majelis Ta’lim untuk membantu kelancaran aktivitas mereka dalam upaya mempercepat upaya mendorong keberdayaan dan kemandirian untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Upaya Pokmas Perempuan yang bergabung dalam Majelis Ta’lim melakukan upaya: *Pertama*, Setiap anggota pengajian yang memiliki kulkas secara sukarela menyisakan tempat dengan inisiatif sendiri maupun kelompok bersedia dititipkan sayur mayur yang tidak laku pada hari itu untuk disimpan di kulkas agar dapat dijual

²³Levitan dalam Sunatiningsih, *Op.cit.*

kembali esok harinya oleh penjual Kemplang pemiliknya. *Kedua*, dana yang digunakan adalah dana pribadi masing-masing, dari hasil penjualan ditabung sedikit demi sedikit kemudian digulirkan sebagai modal usaha.

2. Rencana Aksi Sebagai Rekomendasi Untuk Program Selanjutnya

Di wilayah kelurahan Toboali - Kota Bangka, dari jumlah yang ada difasilitasi oleh Pengurus Majelis Ta'lim mereka dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, dimana masing-masing kelompok terdiri dari 33 orang dengan 1 orang ketua, 32 orang lainnya adalah anggota. Ketua kelompok bertanggungjawab terhadap peredaran dana sekaligus penarikan dana setiap bulannya. Upaya pengelompokan ini dilakukan untuk lebih mudah memberikan binaan, arahan serta pengaturan pemberian dana jika suatu saat mendapat bantuan usaha kecil menengah, selain itu menjadi sebagai alat control kegiatan mereka.

Rencana program adalah membuat kelompok komperasi secara mini atau kecil-kecilan dengan sistem yaitu pada saat perulaan, dana bergulir yang diberikan pada setiap kelompok sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap anggota. Dengan perhitungan setiap bulan mereka akan mengembalikan ke Pengurus Majelis Ta'lim melalui Seksi Pengembangan Umat sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), melalui ketua kelompok masing-masing dengan jangka waktu 15 (lima belas) bulan. Artinya mereka hanya mengembalikan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) setiap harinya dan tanpa dibebani bunga ataupun jasa lainnya.

Hasil pengembalian dana bergulir dari setiap penjual Kemplang perempuan setiap bulannya adalah RP. 30.000,- X 15 orang sehingga uang yang terkumpul berjumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah setiap bulannya. Hal ini berarti bahwa setiap bulan, Seksi Pengembangan Ekonomi Umat pada kelompok Majelis Ta'lim dapat menggulirkan dana tersebut untuk satu orang anggota baru dalam kelompok penjual Kemplang perempuan.

Dengan penambahan modal tersebut, dapat dipastikan bahwa mereka dapat menyisihkan keuntungan yang lebih besar. Hal ini dengan asumsi saat mereka menjajakan dagangan yang rata-rata dengan modal pembelian dagangan Rp. 250.000 per hari mereka dapat menjual dagangan habis dagangan laku Rp. 350.000,-perhari, dengan keuntungan Rp. 75.000,- perhari dengan rata-rata menjajaan pada 20

pelanggan. Namun setelah mereka mendapat tambahan Rp. 450.000,- per orang, mereka memiliki modal Rp. 700.000 dengan penjualan dagangan habis per hari Rp. 1.000.000,- artinya mereka bisa menyisihkan keuntungan kotor sebesar Rp. 300.000,-. Keuntungan bersih mereka setelah dibayarkan penyusutan sepeda motor Rp. 25.000, perhari, bensin Rp. 15.000,- perhari, ongkos kerja Rp. 25.000,- perhari dan cicilan Rp. 1.000 perhari dengan total pengeluaran Rp. 66.000,- perhari maka keuntungan bersih yang mereka dapat peroleh Rp. 239.000,- perhari. Dengan bertambahnya modal bukan berarti berhenti sampai di situ dengan sendirinya mereka tetap membuka penjualan di rumah setelah mereka berjualan keliling untuk menghabiskan dagangan yang kemungkinan masih sisa. Upaya lainnya adalah dengan menitipkan dagangan ke warung lain dan mengolah dagangan sisa menjadi makanan matang untuk diujakan hari berikutnya.

Namun resiko kegagalan yang mungkin terjadi dari modal yang telah diterima sebesar Rp. 450.000,-bukan tidak mungkin karena sesuatu hal sangat sulit untuk dikembalikan secara tetap berdasarkan angsuran yang ditetapkan. Maka kelompok yang juga penanggung renteng akan melakukan negosiasi dengan pokmas perempuan keagamaan sebagai pemberi modal untuk memecahkan masalahnya di mana jaringan (network), norma-norma (norms), dan kepercayaan social (social trust) yang mendorong pada sebuah kolaborasi social (koordinasi dan koperasi) untuk kepentingan bersama.²⁴ Demikian juga diketahui bahwa modal sosial mengacu pada keuntungan dan kesempatan yang didapat seseorang didalam masyarakat melalui keanggotaannya dalam entitas social tertentu. Selanjutnya James Coleman mengatakan bahwa modal social adalah sumberdaya yang lahir dari kumpulan suatu ikatan social tertentu. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa berbeda dengan asset financial yang diperoleh dari kredit, asset sumberdaya manusia yang dapat diperoleh dari intelektualitasnya maka modal social dapat diperoleh dari relasi antar manusia. Di mana teori perilaku social melihat antara perilaku dengan lingkungan terdapat lingkungan yang saling mempengaruhi.²⁵ Modal sosial ini juga yang melahirkan “kontrak social” dan norma yang berlaku bagi seluruh masyarakat.

²⁵John Tibaut, dkk., *Op.Cit.*

3. Data Empirik (Data Lapangan)

Setelah dilakukan penelitian dan pendampingan, ternyata harapan masyarakat di atas pada umumnya belum tercapai sebagaimana rencana program yang tim kami sampaikan pada saat turun ke Lapangan, bahkan boleh dikatakan bahwa harapan dan program tim pendampingan sama sekali belum terlaksana. Demikian juga dalam hal keikutsertaan mereka pada ieven-even tertentu menurut penyampaian mereka belum pernah mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah baik tingkat kelurahan maupun tingkat kota dan provinsi, kami selaku tim peneliti dan pendampingan ikut optimis dengan potensi dan semangat mereka yang sangat tinggi, olehkarenanya patut mendapatkan perhatian dan dukungan finansial yang membuat mereka dapat lebih sejahtera dan berkembang.

PRAKTEK KELOMPOK PEREMPUAN PEMBUAT KEMPLANG

I. Rencana Aksi

- a) Perempuan “Kemplang” dapat meningkatkan ikatan sosial secara lebih intens dengan adanya kesamaan tujuan dan cara pandang yang dibangun bersama.
- b) Perempuan “Kemplang” terbiasa untuk membicarakan bersama-sama apa yang menjadi kepentingan dan kebutuhan mereka.
- c) Perempuan “Kemplang” mengalami bagaimana menyusun aturan main bersama.
- d) Perempuan “Kemplang” memiliki wadah mengidentifikasi kepentingan dan kebutuhan riil mereka secara bersama-sama.
- e) Perempuan “Kemplang” mengalami dan mengerti mekanisme pengambilan keputusan secara kolektif yang didasarkan pada kepentingan dan kebutuhan bersama.
- f) Perempuan “Kemplang” mengalami pembelajaran dalam meresolusi konflik yang bisa jadi menyertai proses dan hasil pengambilan keputusan.
- g) Perempuan “Kemplang” merasakan manfaat keberadaan suatu jaringan kerjasama dalam pemenuhan kebutuhan bersama.
- h) Perempuan “Kemplang” merasakan manfaat bagi keberadaan “Majelis Ta’lim” sebagai pokmas perempuan keagamaan yang mampu memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan mereka.

2. Data Empirik (Data Lapangan)

- a) Perempuan “Kemplang” dapat meningkatkan ikatan sosial secara lebih intens dengan adanya kesamaan tujuan dan cara pandang yang dibangun bersama. Namun yang terjadi di lapangan kebersamaan tersebut masih sebatas inisiatif masing-masing bukan karena atas inisiasi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memerlukan komunikasi dan fasilitator yang bisa menghubungkan dengan program-program Pemerintah tingkat kota dan Provinsi
- b). Perempuan “Kemplang” belum terbiasa untuk membicarakan bersama-sama apa yang menjadi kepentingan dan kebutuhan mereka, hal ini memang dapat dilazimkan namun karena kebersamaan mereka secara pribadi bukan murni dari pihak pemerintah
- c). Perempuan “Kemplang” belum mengalami bagaimana menyusun aturan main bersama.
- d). Perempuan “Kemplang” memiliki wadah mengidentifikasi kepentingan dan kebutuhan riil mereka secara bersama-sama. Sementara ini perkumpulan mereka dilakukan di Mesjid, dan mereka juga setiap hari berkumpul untuk membantu membersihkan ikan yang akan digiling menjadi bahan Kemplang, ikan tsb dikirim ke kota Pangkalpinang. Akan tetapi mereka belum melakukan pembuatan Kemplang secara berkelompok, namun melakukannya di rumah masing-masing.
- e). Perempuan “Kemplang” belum mengalami pelatihan sehingga belum mengerti mekanisme pengambilan keputusan secara kolektif yang didasarkan pada kepentingan dan kebutuhan bersama. Terbukti oleh kelompok ibu-ibu mengalami kebingungan pada saat tim mempertanyakan apakah bisa membentuk kelompok Usaha Kecil khusus usaha Kemplang, dengan harapan jika sudah terbentuk organisasi maka akan lebih memudahkan keikutsertaan mereka pada iven-iven program PEMDA seperti; Bazar, Pelatihan wira usaha, dan bantuan sosial ekonomi bagi usaha kecil menengah.
- f). Perempuan “Kemplang” belum mengalami pembelajaran dalam meresolusi konflik yang bisa jadi menyertai proses dan hasil pengambilan keputusan.
- g) Perempuan “Kemplang” sudah merasakan manfaat keberadaan suatu jaringan kerjasama dalam pemenuhan kebutuhan bersama, namun sebatas mempererat

hubungan silaturahmi dan saling menghibur saat berkumpul, belum menyentuh pada aspek peningkatan kesejahteraan, sosial, ekonomi yang secara nyata.

- h). Perempuan “Kemplang” merasakan manfaat bagi keberadaan “Majelis Ta’lim” sebagai pokmas perempuan keagamaan walaupun harapan mereka memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan pada nilai yang lebih maksimal belum mampu mereka wujudkan mereka. Akan tetapi dengan kehadiran tim pemberdayaan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri S(STAIN) Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung menjadi harapan baru bagi mereka untuk eksis.

Sikap dari Tim Pemberdayaan dari STAIN SAS Babel adalah merekomendasikan mereka agar bisa mendapatkan perhatian pemerintah daerah, baik secara organisasi maupun secara keagamaan namun sebagai kelompok Pembuat Kemplang.

PENUTUP

A. Simpulan

Pokmas Perempuan dalam satu sisi, di masyarakat Indonesia wajar ada sebagai wadah kaum perempuan untuk menunjukkan perannya di lingkungan mereka

Masyarakat miskin dengan keterbatasan dan ketidakberdayaan mereka, berpotensi menyerah terhadap kondisi kehidupan dan semakin jauh dari suatu harapan sebagai suatu masyarakat sejahtera. Pada umumnya mereka kesulitan meningkatkan taraf hidup. Kelompok masyarakat yang dibentuk oleh Pemerintah karena program-program pembangunan ataupun yang tumbuh karena kepetingan tertentu dibidang ekonomi lebih mempermudah digunakan untuk bersama-sama meningkatkan dan mempercepat kemandirian perempuan dalam usaha di sektor ekonomi mikro kecil.

Kelompok masyarakat perempuan menjadi sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perempuan dengan memberi akses modal dalam peningkatan usaha ekonomi produktif mereka agar lebih mandiri dan memiliki keberdayaan dalam meningkatkan dan mengembangkan usahanya melalui pokmas-pokmas yang ada.

Setelah dilakukan penelitian dan pendampingan, ternyata harapan masyarakat di atas pada umumnya belum tercapai sebagaimana rencana program yang tim kami sampaikan pada saat turun ke Lapangan, bahkan boleh dikatakan bahwa harapan dan program tim pendampingan sama sekali belum terlaksana. Demikian juga dalam hal keikutsertaan mereka pada ieven-even tertentu menurut penyampaian mereka belum pernah mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah baik tingkat kelurahan maupun tingkat kota dan provinsi, kami selaku tim peneliti dan pendampingan ikut optimis dengan potensi dan semangat mereka yang sangat tinggi, olehkarenanya patut mendapatkan perhatian dan dukungan finansial yang membuat mereka dapat lebih sejahtera dan berkembang.

Rencana program adalah membuat kelompok komperasi secara mini atau kecil-kecilan dengan sistem yaitu pada saat permulaan, dana bergulir yang diberikan pada setiap kelompok sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap anggota. Dengan perhitungan setiap bulan mereka akan mengembalikan ke Pengurus Majelis Ta'lim melalui Seksi Pengembangan Umat sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), melalui ketua kelompok masing-masing dengan jangka waktu 15 (lima belas) bulan. Artinya mereka hanya mengembalikan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) setiap harinya dan tanpa dibebani bunga ataupun jasa lainnya.

Sebagian rencana program berhasil dilakukan sampai batas memaping atau menginpentarisir potensi-potensi lokal di Toboali, namun belum dapat melakukan pendampingan secara masiv dan berkekal. Program ini bisa mencapai hasil yang efektif dan maksimal jika masyarakat mendapat dukungan dana secara berkelanjutan oleh pihak pemerintah, oleh karena itulah yang menjadi poin penting pada moment pendampingan kali ini adalah hasil maping dan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait.

B. Saran

Dalam rangka membangun ekonomi micro masyarakat Toboáli khususnya di kalangan Perempuan Pembuat Kemplang yang secara langsung juga sebagai kelompok Majelis Ta'lim, kepedulian dan perhatian secara sungguh-sungguh untuk menindaklanjuti program pemberdayaan ini oleh pihak baik akademik maupun pemerintah sangatlah diperlukan.

Demikian juga para dosen, diharapkan dapat melanjutkan penelitian dan pendampingan di daerah ini mengingat potensi pemberdayaan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat di tempat itu sangat potensial. Untuk pihak kampus, dapat membuat prioritas penelitian dan pengabdian yang di kelolah oleh P3M (Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) SAS Bangka Belitung untuk anggran tahun-tahun berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, M.C. 2002. "Wajah Murung Ketenagakerjaan Kita", Kompas, 25 November
- Brata, Aloysius Gunadi. 2001. **Agar Desentralisasi Bermakna Bagi Modal Sosial**. Artikel dalam www.saturnet.com
- Coleman, J.S. 1988. **Social Capital in the Creation Of Human Capital' American Journal of Sociologi**94 (Supplement): S95-S120.
- Esman, Milton J. dan Norman T. Uphoff, **Local Organisations: Intermediaries in Rural Development**, 1988. Cornell University Press, Ithaca and London.
- Karsidi, Ravik. 1997. **Persiapan Sosial**, Makalah Pelatihan Pendampingan Pengusaha Usaha Mikro, Bangka: Bank Indonesia.
- Kuncoroningrat, Mudrajad, 2004. **Otonomi dan Pembangunan Daerah. Reformasi. Perencanaan, Strategi, dan Peluang**. Erlangga, Jakarta.
- Linz, Juan J dan Alfred Stepan, 1996. **Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe**, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London.
- Mubyarto. 1991. Strategi **Pembangunan Pedesaan**, Yogyakarta: P3PK UGM.
- Rahardjo, Murwatie B. dan Sukardi Rinakit, **Pemberdayaan Petani dalam Buku Pemberdayaannya, Konsep, Kebijakan dan Implementasinya**. Center For Strategic and International Studies. Jakarta. 1996
- Raharjo, M. Dawam. 1989. **Metode Pelibatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pedesaan**. makalah *Diskusi Periodik di PSPP Lemlit UNS*. Surakarta 21 Oktober 1989.
- Rappaport J. 1985. "The Power of Empowerment Language, *Journal of Social Policy*", 16.
- Rondinelli, Denis A. 1990. **Proyek Pembangunan Sebagai Manajemen Terpadu**. Bumi Aksara. Jakarta.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 1996. **Pembangunan, Dilema dan Tantangan**. Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Ruwiyanto, Wahyudi. 1988. **Pengaruh factor-faktor Dinamika Organisasi Lembaga Pendidikan Karya Terhadap Manfaat Sosio Ekonomi Warga Belajar**. Disertasi S3. Bogor: Fak. Pasca Sarjana IPB.
- Setianto. Imam. 2000. Analisis Fungsi-fungsi Manajemen Lembaga Lokal di Desa Cemorokandang. Kec. Kedung Kandang Dat II Malang

Sunatiningsih, Agnes. 2004. **Pemberdayaan Masyarakat Desa: Melalui Institusi Lokal.** Gajahmada. Yagyakarta.

Suryahadi, A.W. Widyanti, D. Perwira, S. Sumarto. “ **Minimum Wage Policy and Its Impact on Employment in the Urban Formal Sector**”, *Bulletin of Indonesian Economic Studies Vol39* No 1,29 – 50.

Swift C. dan G. Levin, “**Empowerment: An Emerging Mental Health Technology**”, *Journal of Primary Prevention*, 7.

Tonkiss, F. 2000. “**Does Social Capital and Economy,**” Dalam F. Tonkiss dan A. Pasey (eds.) *Trust and Civil Society*. New York:St. Martin's